



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRA TURSILOWATI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 485008

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/200 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/163 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m2/232 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 1.000.000.000		
5. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, WARISAN Rp. 100.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	150.000.000
1. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	545.000.000
D. SURAT BERTAHAPAN	Rp.	2.133.306.500
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.155.147.447
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	9.783.453.947



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.783.453.947

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.